



Dana Hibah untuk Ormas Meningkatkan

Hibah diduga dibagikan untuk organisasi masyarakat pendukung Anies-Sandiaga.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta bakal menaikkan dana hibah pada tahun depan. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 menyebutkan alokasi dana hibah sebesar Rp 2,84 triliun, naik dari Rp 2,75 triliun pada tahun ini. “Bukan hanya dana hibah, kami juga mendorong pengadaan swakelola tipe 3 dan 4,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada *Tempo* di Balai Kota, Jumat pekan lalu.

Swakelola tipe 3 ialah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan pemerintah dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Sedangkan swakelola tipe 4 merupakan swakelola yang direncanakan pemerintah berdasarkan usul kelompok masyarakat dan pelaksanaannya ditangani oleh kelompok masyarakat itu. “Dengan cara begitu, proses pembangunannya juga dimiliki masyarakat,” tutur Anies.

Gubernur Anies terus meningkatkan gelontoran dana hibah. Dari Rp 1,88 triliun pada tahun lalu, kini jumlahnya menjadi Rp 2,75 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 2,84 triliun pada tahun depan.

Berdasarkan penelusuran *Tempo*, dana hibah pada tahun depan diduga bakal diberikan kepada sejumlah ormas yang mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno saat pemilihan gubernur Jakarta 2017. Salah satu ormas yang batal mendapatkan dana hibah

karena afiliasi politik ialah Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran, dan Anarkis (Gepenta).

Nina Haryati, anggota Gepenta, mengungkapkan pernah mengikuti acara yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta pada 17 Juni lalu. Nina bersama 90-an orang dari berbagai ormas menginap selama tiga hari di Hotel Gerbera, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Di lokasi, Nina melanjutkan, Kepala Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Eliazer Hutapea, memberikan penjelasan tentang dana hibah hingga Rp 1 miliar untuk setiap ormas. Syaratnya, mereka mesti mengajukan proposal yang mendukung program kerja gubernur.

Harapan Nina mendapat dana hibah untuk organisasinya memudar. Sebab, kata Nina, dalam pemaparan itu Eliazer menyatakan pemerintah DKI memprioritaskan mereka yang mendukung Anies-Sandiaga dalam pemilihan gubernur 2017 sebagai penerima dana hibah. Gepenta tidak ikut mendukung pasangan itu. Mereka pun tak masuk daftar ormas penerima hibah dari pemerintah DKI pada 2020, yang salinannya diperoleh *Tempo*.

Perkumpulan Ustadzah Peduli Negeri tertulis dalam daftar penerima hibah dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Nilainya Rp 317,6 juta. Marhamah, bendahara perkumpulan itu, mengakui sebagai pendukung Anies-Sandiaga. Dalam pemilihan presiden, ormas itu juga mendukung pasangan Prabowo Subian-

to dan Sandiaga Uno.

Nurdiati Akma, Ketua Ustadzah Peduli Negeri, mengajukan proposal dana hibah sejak 2018. Gagal pada percobaan pertama, mereka kembali mengajukan proposal. Pada September lalu, Nurdiati mendapat kabar dari perwakilan pemerintah DKI bahwa organisasinya memperoleh dana hibah. Saat itu, dia juga diberi tahu alasan tak mendapat dana hibah pada 2019. “Istilahnya 1-0-1. Tahun ini dapat, dua tahun kemudian baru bisa dapat lagi.”

Eliazer enggan berkomentar tentang persyaratan mendukung Anies-Sandiaga untuk mendapatkan dana hibah. “Siapa yang mengarahkan ke saya?”

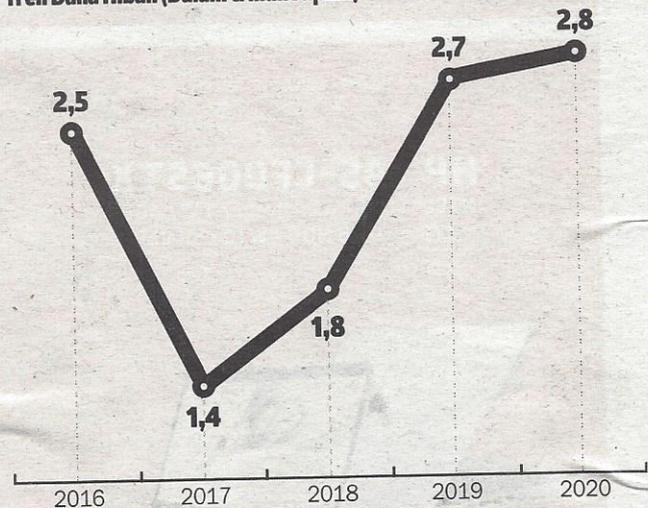
kata Eliazer melalui pesan WhatsApp.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Taufan Bakri, menampik kabar bahwa lembaganya memberikan hibah dengan syarat ormas itu mendukung Anies dalam pemilihan gubernur lalu. “Siapa pun bisa mendapatkan dana hibah,” katanya.

Menurut Anies, dana hibah secara keseluruhan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dia membantah royal membagikan dana hibah bagi pendukungnya dalam pemilihan gubernur. “Semua ormas silakan mengajukan. Ada proses seleksinya,” katanya.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN

Tren Dana Hibah (Dalam triliun rupiah)



Penerima Pos Hibah (Dalam triliun rupiah)

Tahun	Ormas	Masjid-Musala	Dewan Masjid	PGRI	Himpaudi*
2016	8,1	0,1	6	1,8	0
2017	1,4	1,2	13	1,8	0
2018	4	1,58	34,7	367,2	40,2
2019	11,5	4,3	126,7	323,7	40,3
2020	11	4,2	189,9	319	34

Catatan:

*) Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
SUMBER: Pemerintah DKI Jakarta